

PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN BAGI KAUM DIFABEL
(Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan
Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo)

Rima Setyaningsih

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

Email: rimasetyaningsih10@gmail.com

Th. A. Gutama

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

Email: thomasaquinas@staff.uns.ac.id

Received: 2-5-2016

Accepted: 20-5-2016

Online Published: 29-5-2016

Abstract

The purpose of this research is to know the problem faced by the difabel people so that empowerment program is important to be given. Knowing the empowerment strategy which given by Sehati Association for developing the independency of difabel people especially in Sukoharjo regency is the other purpose of this research. This research use structural-fungsionalism theory by Talcott Parsons. The kind of research is qualitative research by case study approach with interview, observation, and documentation of data interpretation. The sample use purposive sampling technique. The source triangulation and interactive data analysis is used for data validity guaranty. From the result of this research, we can find that there are many problems felt by the difabel such as social, economic, psychology, culture, education, and accessibility problems. Difabel empowerment is one of the efforts of Sehati Association as organization for difabel in Sukoharjo Regency, to give a chance for them developing their self without any discrimination. The people with disabilities need to increase the quality of their self especially to break the "dependence" image to the other person. Empowerment strategy which is done by Sehati Association to increase the independency of difabel is by several programs i.e. character building, entrepreneurship, socialization, education, advocacy, participation, and economic enterprise. The result of the effect which accepted by difabel in Sukoharjo regency which is being the member of Sahati Association have experienced an increase of psychology, social, and economic aspect. The conclusion of this research is the difabel who is active to follow all of the activities of Sehati Association, grow more independence and no more depends their self on their family or others.

Key Words: Difabel, The Role of Sehati Association, Independency

A. Pendahuluan

Setiap orang terlahir dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan setiap manusia baik secara fisik maupun non fisik yang dinilai tidak normal disebut dengan istilah penyandang

cacat. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cacat sendiri adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak). Dalam Majalah

Kentingan Edisi September 2011 disebutkan bahwa pada tahun 1999, istilah “penyandang cacat” diganti dengan kata “difabel” (*Different Ability*). Penggantian istilah ini dimaksudkan untuk memberikan makna yang lebih halus serta lebih memmanusiakan kaum berkebutuhan khusus. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik yang berbeda.

Menurut data dari LSM tahun 2014 jumlah difabel yang ada di Indonesia lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan data dari Dinas Sosial jumlah difabel yang ada di Kabupaten Sukoharjo ada 506 jiwa, terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kecacatan yang dimiliki pun beragam yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna mental, tuna grahita, kelainan pada kaki atau tangan, dan beberapa jenis penyandang penyakit yang menimbulkan kecacatan seperti folio dan campak.

Difabel dimata masyarakat saat ini masih dipandang sebelah mata sebagai pihak yang perlu dikasihani. Bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga difabel terkadang menjadikan mereka sebagai aib keluarga yang ditutupi keberadaannya. Difabel di Indonesia harus menghadapi adanya “budaya aib” tersebut, dalam budaya aib penampilan fisik yang terlihat selalu menjadi sorotan utama daripada sikap-sikap yang dimiliki dalam diri. Keterbatasan difabel harus berhadapan dengan sistem kaku yang

berlaku dimasyarakat, sistem pembagian kerja dan sistem interaksi. Perusahaan menolak adanya karyawan difabel karena keterbatasan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerjanya, dengan kata lain kinerja karyawan difabel lambat dan tidak sesuai target.

Difabel menyebabkan kemiskinan melalui beberapa proses eksklusi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti partisipasi difabel yang cenderung sangat minim baik diarah sosial maupun politik. Sebagian besar difabel memiliki kecenderungan yang “eksklusif” ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam artian mengasingkan dirinya dalam proses interaksi masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirinya karena kecenderungan ini menjadikan difabel minim akses informasi dan komunikasi. Minimnya informasi dan komunikasi tentu berpengaruh kepada keadaan sosial dan ekonomi dari difabel sendiri, dimana mereka tidak bisa membuka jaringan sosial (*social networking*) yang sangat penting terutama untuk mengakses dunia pekerjaan.

Penelitian tentang hubungan difabel dan kemiskinan memang masih terus meningkat seperti hasil penelitian dari WHO (World Health Organization 2011) yang mengacu pada pengaruh kecacatan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun memiliki hubungan yang erat antar kedua variabel tersebut, namun belum pasti perbedaan mekanisme yang mendasari “lingkaran setan” difabel dan kemiskinan di berbagai negara (Eide and Ingstad 2013). Statistik dari PBB menunjukkan bahwa dari perkiraan 500.000 difabel, sekitar 80% diantaranya

tinggal di negara berkembang. Kurang dari 10% mempunyai akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang penghidupan, lebih dari 80% difabel menganggur, dan di negara-negara berkembang 75%-90% difabel hidup dibawah garis kemiskinan. Di Indonesia perkiraan tentang jumlah penduduk difabel sekitar 0,25% hingga 10% dari total penduduk (Reckinger, Carole dan Winarmo, 2011 : 44).

Di mata hukum, difabel mempunyai hak yang sama dengan orang lain sesuai yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1997 dimana difabel seharusnya memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses ke fasilitas-fasilitas termasuk layanan-layanan umum. Disabilitas mempunyai banyak wajah dan terdapat dalam banyak bentuk, setiap individu mengalami integrasi dan peminggiran secara berbeda-beda. Bukan rahasia lagi bahwa para difabel sering menjadi sasaran sikap sosial yang negatif yang berupa pengesampingan dari aktivitas sosial. Permasalahan klasik yang terjadi pada difabel adalah pengangguran, hal ini karena hanya sedikit pihak yang mempercayakan pekerjaannya kepada difabel. Hasilnya, kaum difabel harus mengupayakan berwirausaha agar bisa menopang kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, berwirausaha tetap memiliki resiko yang tinggi mulai dari pengadaan modal hingga dasar ketrampilan yang wajib dikuasai oleh difabel ditengah keterbatasan fisik yang mereka miliki.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan ekonomi dan sosial

difabel telah dilakukan meskipun belum maksimal. Pemerintah berusaha mengubah persepsi masyarakat tentang difabel, bahwa difabel (penyandang cacat) merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir permasalahan sosial dan ekonomi difabel di masyarakat dengan adanya LBK (Loka Bina Karya) yaitu pusat rehabilitasi bagi para difabel untuk melatih ketrampilan yang berguna bagi dunia kerja.

Selain organisasi formal seperti LBK yang didirikan oleh pemerintah, ada berbagai Paguyuban dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan difabel yang tersebar diseluruh kota di Indonesia. Salah satunya di kabupaten Sukoharjo yang menjadi tempat penelitian adalah Paguyuban Sehati. Paguyuban ini fokus pada *empowering of disability* atau pemberdayaan kaum difabel diseluruh Kabupaten Sukoharjo dengan tanpa batasan umur. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu mengembangkan potensi difabel yang selama ini belum ditunjukkan ditengah-tengah masyarakat terutama untuk memandirikan seluruh difabel. Catatan penting dari Paguyuban ini adalah point aksi yang harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan difabel.

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini Parsons menjelaskan tentang empat fungsi imperatif dalam sebuah sistem yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan skema

AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*). Parsons juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem sehingga dalam bermasyarakat harus ada empat fungsi AGIL untuk tetap memposisikan masyarakat dalam keadaan stabil atau seimbang karena suatu sistem cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan diri atau *equilibrium*. Dalam penelitian pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati ini melihat teori AGIL sebagai dasar analisis bagi Paguyuban untuk menentukan arah pengembangan kemandirian bagi kaum difabel.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan stragtegi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2006 : 1).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari beberapa Kecamatan karena anggota dari Paguyuban Sehati sendiri tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penelitian juga dilakukan di kantor Paguyuban Sehati selaku subjek dari penelitian ini yang beralamat di Jalan Serang 11 B RT 03/01 Kelurahan Gayam Sukoharjo (bekas kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

teknik pengumpulan *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 14 orang yang terdiri dari lima difabel anggota Paguyuban, keluarga, masyarakat sekitar dan juga pengurus Paguyuban sebagai informan yang dianggap mengetahui dan memberikan informasi untuk membantu penulis dalam penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara, perekaman, pemotretan, dengan informan yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui wawancara mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *indepth interview*, pengamatan langsung di lapangan (observasi), dan studi literatur. Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) yaitu pengumpulan data menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Dengan mencari data yang sama untuk mencari kebenaran dari masalah dan mengecek kebenaran suatu informasi pada waktu dan alat yang berbeda. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisa model interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat ditarik beberapa kajian mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh difabel di Kabupaten Sukoharjo baik dalam sisi psikologi, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya program-program yang dibuat oleh Paguyuban Sehati beserta strategi pelaksanaanya

yang juga ditemukan faktor pendorong serta penghambatnya. Terakhir hasil dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati terhadap difabel baik peningkatan sisi psikologi, sosial dan ekonomi.

Banyak permasalahan yang dialami oleh difabel berdasarkan hasil temuan penelitian terutama berasal dari persepsi masyarakat tentang difabel yang masih bernada meremehkan. Masyarakat menjadikan keterbatasan fisik sebagai tolak ukur untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh difabel sehingga akibatnya banyak peran yang tidak dipercayakan kepada seorang difabel. Secara ekonomi akses difabel terhadap dunia pekerjaan sangatlah minim, para pemilik modal tidak memberikan kesempatan kepada difabel untuk menjadi karyawan mereka dengan alasan kemampuan yang tidak memenuhi standar. Kemiskinan juga dialami oleh para difabel di Kabupaten Sukoharjo yang menghambat mereka untuk mendapatkan kehidupan layak terutama dari segi perawatan medis yang padahal sangat mereka butuhkan. Fasilitas kesehatan yang diberikan untuk masyarakat nyatanya belum terjangkau oleh mereka dari segi harga karena perawatan bagi difabel cukup menguras kantong perekonomian keluarga.

Selanjutnya difabel jarang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya pada forum-forum resmi yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan. Selama ini partisipasi difabel masih sangat minim dalam berbagai kegiatan formal yang berhubungan langsung dengan Pemerintah. Pola pikir

masyarakat masih menjadikan difabel sebagai obyek atau sasaran penerima program dan belum dilibatkan sebagai subyek perencana maupun pelaksana teknis program padahal program tersebut menyangkut hidup mereka. Pada akhirnya banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan difabel atau belum memenuhi standar kelayakan seperti yang ditemukan dilapangan adalah adanya fasilitas publik berupa ramp (jalan miring) di pasar Ir. Soekarno Sukoharjo yang tidak bisa digunakan oleh difabel karena ketajaman kemiringan yang membahayakan.

Urgensi sebuah pemberdayaan bagi komunitas difabel yang selama ini belum dijangkau oleh tangan Pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena mereka harus hidup secara mandiri dan tidak bisa mengandalkan bantuan dari orang lain baik Pemerintah maupun organisasi lain secara berkelanjutan. Kemandirian adalah salah satu tujuan yang harus didapatkan agar difabel tidak lagi mengalami permasalahan-permasalahan ekstrim yang telah membuat hak-hak mereka diabaikan.

Penelitian ini didukung menggunakan yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yaitu teori fungsionalisme struktural. Dalam teori ini Parsons menjelaskan tentang empat fungsi yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem yang dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*). Paguyuban Sehati menggunakan pendekatan AGIL sebagai salah satu strategi untuk memberikan pemberdayaan kepada para difabel di Kabupaten Sukoharjo dengan melalui program-program yang tidak hanya

melibatkan mereka namun juga masyarakat umum.

Analisis AGIL dalam penelitian ini menyangkut empat sub sistem yang saling berkaitan dan wajib untuk terpenuhi agar tercipta sistem masyarakat yang stabil. Pertama, sub sistem organis perilaku yang dianggap sebagai fungsional adaptif yang mengharuskan untuk fokus dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Disini kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan materi maupun non-materi. Dalam kebutuhan materi, sisi ekonomi mendominasi melalui peran difabel dalam menghidupi dirinya sendiri. Difabel telah mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan peran kerja untuk menghasilkan uang. Lingkaran kemiskinan akibat pengangguran telah menjerat mayoritas difabel tanpa ketrampilan. Dari kebutuhan ekonomi yang mendesak sisi biologis difabel kemudian pengakuan dan keadilan merupakan kebutuhan non-materi yang selanjutnya harus terpenuhi. Selama ini masyarakat memiliki pola pikir yang memarjinalkan kaum difabel, banyak dari hak-hak difabel yang tidak terpenuhi. Pada akhirnya ada *gap* yang memisahkan difabel dengan masyarakat disekitarnya dan inilah gejala yang menghambat kestabilan sistem masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga membutuhkan peran aktif dari difabel untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan yang selama ini tidak banyak melibatkan difabel. Paguyuban Sehati berperan untuk menyerap aspirasi kebutuhan difabel maupun masyarakat agar dapat tercipta hubungan timbal balik yang seimbang antara kedua belah pihak. Melalui berbagai kegiatan kebutuhan dipenuhi secara berproses agar difabel dapat hidup sebagai

mana mestinya dan hidup berdampingan dengan masyarakat.

Sub sistem kedua adalah kepribadian yang dalam konteks ini berkaitan dengan motivasi yang secara tidak langsung dibentuk oleh para difabel untuk mencapai tujuan kemandirian seperti tujuan Paguyuban Sehati. Disini difabel telah menjadi aktor pasif yang menerima pengaruh dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Paguyuban. Motivasi dibentuk dari pemahaman akan nilai dan norma yang dikonsensuskan baik oleh difabel maupun masyarakat melalui Paguyuban Sehati. Difabel telah diarahkan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan baik yang dibuat oleh Paguyuban Sehati maupun SKPD berwenang yang menaungi difabel di Kabupaten Sukoharjo untuk bertindak selaras dengan nilai dan norma yang telah dibudayakan demi mencapai tujuan yaitu memandirikan kaum minoritas seperti difabel yang rentan pada sisi perekonomian, sosial maupun politik.

Fungsi integrasi yang mengontrol seluruh sub-sub sistem agar berjalan selaras tanpa ada satupun yang tidak dipenuhi merupakan sebuah sub sistem sosial. Kegiatan-kegiatan Paguyuban Sehati menjadi simbol sub sistem sosial yang mengupayakan sosialisasi kepada para difabel agar bisa menjalani hidup sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan diharapkan oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Paguyuban melalui berbagai kegiatan dan program dilakukan oleh pengurus Paguyuban, Pemerintah, dan mitra organisasi yang hasilnya sukses melembagakan nilai dan norma yang benar kepada para

difabel. Aksi Paguyuban Sehati telah menetralkan gejala yang timbul akibat dari pola pikir masyarakat yang salah tentang difabel dan memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada difabel begitupun sebaliknya. Pola ini dibentuk untuk mengontrol dan menyatukan seluruh sub sistem agar masyarakat berjalan dengan seimbang sesuai tujuan dari semua pihak.

Terakhir, sub sistem kultural (budaya) yang membentuk tindakan dari manusia sesuai dengan nilai dan norma yang dianut dalam masing-masing budaya. Paguyuban Sehati memperkenalkan budaya yang didalamnya mengandung nilai-nilai dan aturan yang seharusnya serta tidak seharusnya dilakukan oleh difabel di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Internalisasi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan (sanggar inklusi), *character building* (sesuai nilai agama masing-masing) dan *peer konseling* (keluarga) adalah strategi-strategi yang dilakukan Paguyuban untuk mengendalikan kepribadian difabel. Pada hasilnya difabel telah melembagakan karakter yang percaya diri, aktif dan berpengetahuan luas seperti tujuan mandiri yang ingin dicapai. Paguyuban Sehati telah menjadi fasilitator yang memperbaiki konflik semu antara difabel dengan masyarakat umum dari segi persepsi. Keseimbangan masyarakat sedikit demi sedikit telah mulai terlihat dari interaksi yang tanpa batas antara difabel dengan masyarakat.

Teori Fungsionalisme struktural menganalisis peran dari Paguyuban Sehati terhadap kemandirian difabel yang pada temuannya memiliki *impact* yang besar. Pada hasil penelitian para

difabel di Kabupaten Sukoharjo terutama yang aktif dalam kegiatan-kegiatan Paguyuban mulai dari *character building*, bidang ekonomi, sosialisasi hingga partisipasi sosial memiliki peningkatan yang signifikan dalam bidang-bidang tersebut. Program yang dibuat oleh Paguyuban telah direlevansikan sesuai dengan analisis kebutuhan difabel yang menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi di masyarakat dan memberikan ketidakseimbangan pada sistem sosial.

Peningkatan-peningkatan dari segi psikologi, ekonomi hingga sosial bermasyarakat menjadi dampak positif yang diterima oleh para difabel anggota binaan Paguyuban Sehati. Sesuai dengan analisis AGIL, pencapaian tujuan oleh Paguyuban Sehati telah sesuai dengan kebutuhan difabel dan masyarakat. Tujuan Paguyuban dan kebutuhan masyarakat yang diharapkan kemandirian difabel telah terpenuhi oleh sebagian besar dari difabel di Kabupaten Sukoharjo. Hampir seluruh difabel telah membuka diri untuk menerima perubahan yang ditawarkan oleh Paguyuban bahkan para anggota Paguyuban yang dijadikan informan oleh peneliti menunjukkan karakter yang percaya diri, berpengetahuan luas, berpengalaman, dan mandiri secara karakter dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain.

Secara ekonomi para difabel juga mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatan tidak signifikan pada bertambahnya jumlah materi yang didapatkan namun para difabel dibekali dengan *soft skill* yang baru dan lebih terampil. Beberapa informan juga

memiliki usaha baru dengan berwirausaha atau mendapatkan mata pencaharian baru. Sehingga secara langsung difabel tidak lagi menggantungkan kebutuhan ekonomi kepada orang lain terutama kepada keluarganya sendiri. Pola-pola kemandirian secara ekonomi telah menunjukkan perkembangan yang besar pada perubahan diri difabel dan pola tersebut terpelihara dengan baik oleh difabel binaan Paguyuban Sehati.

Konsep kemandirian juga bisa dinilai dari peran difabel pada kegiatan dimasyarakat. Difabel yang mandiri mampu menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai kegiatan dilingkungannya maupun diluar lingkungannya. Hasil temuan menunjukkan bahwa Paguyuban Sehati telah memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter difabel yang dapat meningkatkan partisipasi difabel pada kehidupan sosial. Difabel telah mengakses peluang untuk bersosialisasi dengan masyarakat secara bebas dan terbuka dengan meruntuhkan dinding pengkotak-kotakan diantara mereka. Interaksi yang kian membaik antara difabel, masyarakat non difabel dengan Pemerintah pada akhirnya akan memberikan sumbangsih terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan inklusif.

Hasil penelitian pada peran Paguyuban terhadap kemandirian difabel terkhusus di Kabupaten Sukoharjo menguatkan teori struktural fungsionalisme dari Parsons. Paguyuban Sehati mendesain sebuah sistem yang menurut teori Parsons telah memenuhi syarat dalam pembagian empat imperatif fungsi yaitu adaptasi, tujuan, integrasi, dan latensi. Paguyuban Sehati telah

memberikan peranya dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap difabel dengan menciptakan difabel yang mandiri. Mayoritas difabel binaan Paguyuban Sehati telah membuktikan bahwa keberadaanya bukanlah sebagai “benalu” yang menggantungkan diri terhadap orang lain.

Beberapa difabel anggota Paguyuban merasa bahwa masyarakat kini melihat keberadaanya sebagai seseorang yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat disekitarnya. Masyarakat bahkan menjadikan difabel sebagai fasilitator akses bantuan dari Pemerintah Daerah dengan menjadikan mereka sebagai pusat informasi. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan situasi difabel dahulu yang banyak dipandang sebagai seseorang yang lemah. Kehidupan bermasyarakat antara difabel dengan anggota masyarakat lain kini telah mengalami perubahan yang signifikan mengarah pada hal yang positif. Hal ini dikarenakan oleh perubahan dari kaum difabel sendiri yang banyak mengalami peningkatan mulai dari sisi psikologi, ekonomi dan peran sosial. Sehingga difabel bisa menunjukkan kemandirianya didepan masyarakat luas tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun lagi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang berjudul pengembangan kemandirian bagi kaum difabel yang difokuskan pada peran Paguyuban Sehati dalam pemberdayaan difabel di Kabupaten Sukoharjo, dapat diambil kesimpulan dari data informan bahwa banyak ditemukan permasalahan yang

dialami oleh difabel mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, pendidikan hingga aksesibilitas. Stereotip di masyarakat yang masih memandang difabel sebagai kaum yang lemah membuat mereka termarginalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Peminggiran kaum difabel menghambat interaksi yang leluasa antar difabel dengan masyarakat yang *impactnya* justru mengakibatkan rendahnya partisipasi difabel dalam forum kemasyarakatan. Terbatasnya akses difabel terhadap peluang kerja ditambah dengan minimnya *soft skill* yang dimiliki oleh difabel menjadi bukti bahwa mayoritas difabel masuk dalam siklus lingkaran kemiskinan yang membuat mereka menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

Pemberdayaan difabel adalah salah satu upaya dari Paguyuban Sehati yang selama ini menjadi wadah bagi difabel di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan nafas segar bagi para difabel agar bisa mengembangkan dirinya dan memiliki kehidupan yang layak tanpa ada diskriminasi. Para difabel sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dirinya terutama menghilangkan citra “ketergantungan” terhadap orang lain. Sehingga pengembangan kemandirian bagi difabel adalah salah satu program *urgent* baik bagi Pemerintah maupun organisasi non-pemerintah seperti LSM dan Komunitas peduli difabel untuk memberikan hak-hak difabel sebagai warga negara yang memiliki derajat yang sama dimata hukum tanpa melihat perbedaan fisik.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Sehati

untuk meningkatkan kemandirian dalam diri difabel dengan melalui berbagai program-program yaitu (1) *character building* yaitu *training* dan motivasi, (2) kewirausahaan melalui KUBE, pelatihan ketrampilan dan *expo* produk, (3) sosialisasi tentang difabel, *peer konseling*, *gender* dan KDRT serta HAM, (4) pendidikan dengan sanggar inklusi, (5) advokasi untuk Jamkesmas, SIM D dan fasilitas publik, (6) partisipasi terutama dalam Musrengbangkel, dan terakhir (7) perkoperasian baik simpan pinjam maupun usaha.

Pada hasilnya dampak yang diterima oleh difabel di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi anggota di Paguyuban Sehati telah mengalami peningkatan baik dalam segi psikologi, sosial dan ekonomi. Difabel lebih percaya diri dan berpengetahuan luas karena pengalaman yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan di Paguyuban. Selain itu, pandangan masyarakat juga mulai terbuka terhadap mereka dengan tidak memandang difabel sebagai kaum yang lemah. Secara ekonomi difabel juga meningkat baik dengan pekerjaan atau wirausaha yang berbasis ketrampilan baru sehingga memberikan pendapatan yang mampu menopang kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa difabel yang aktif dalam mengikuti kegiatan Paguyuban Sehati berkembang lebih mandiri dan tidak lagi menggantungkan diri mereka terhadap keluarga maupun orang lain.

Datar Pustaka

Sumber Buku :

Basri, Hasan. 1995. Remaja Berkualitas, Problematika

- Remaja dan Solusinya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Boeree, C.G. 2005. *Personality theories* (Cetakan ke II). Yogyakarta : Primashopie.
- Coleridge, Peter. 1996. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development Creating Comunnity Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australian : Logman.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT Pustaka Cidesindo.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Centre or Strategic and International Studies (CSIS).
- Reckinger, Carole, dan Winarmo, Michael Yudha (diterjemahkan oleh Theresia Wuryantari. 2010. *Towards an Inclusive Society in Indonesia : A Bridge Over Trouble Water*. Caritas Germany. Yogyakarta : Country Ofice Indonesia.
- Ritzer Goerge and Goodman, Douglas J. 2013. *Teori Sosiologi, Daru Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Cetakan ke IX). Bantul : Kreasi Wacana.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitati*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Schaaeer, Charles. 1996. *Cara Efekti Mendidik dan Mendisiplinkan Anak, terjemahaan Turman Sirait*. Jakarta : Mitra Utama.
- Slamet, Margono. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.
- Slamet, Yulius. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : UNS Press.
- Sulistiyani, Ambar T dan Rosidah. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori, dan Pembangunan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zakiyah Drajat. 2000. *Psikologi Anak dan Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumber Buletin :**
CBM (diterjemahkan CBM Indonesia). 2012. *Inklusi Itu Mudah, Inklusi Disabilitas : Mata Pencapaian*. Bagian B. Jakarta : CBM Indonesia.
- CBM (diterjemahkan CBM Indonesia). 2012. *Inklusi Itu Mudah, Panduan Praktis Program Untuk Isu Disabilitas Pembangunan*. Jakarta : CBM Indonesia.
- Sumber Jurnal :**
Eide, Anne H and Ingstad, Benedicated. *Disability and poverty – Rekection on research experiences in Africa and beyond..* Diakses 11 Oktober 2015, dari African Journal of Disability (www.ajod.org)

Anne Marie W.H, Albert P. Chaki, dan Ruth Mlay. *Occupational Therapy Synergy between Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania and Heifer International to Reduce Poverty*. Diakses 07 November 2015, dari African Journal of Disability (www.ajod.org)

Mary Wickenden, Diane Muligan, Gertrude O.Fefoame dan Phoebe Katende. *Stakeholder consultations on community-based rehabilitation guidelines in Ghana and Uganda*. Diakses 07 November 2015, dari African Journal of Disability (www.ajod.org)

Sumber Undang-Undang :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Difabel).

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber Website Online :

Rahardjo, Mudjia. 2010. Triangulasi Data dan Penelitian Kualitatif. <http://mudjirahardjo.com>
Diakses tanggal 26 Oktober 2015.